

Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Studi Implementasi Penganggaran Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Reinterpreting Performance-Based Budgeting: A Study Of Budgeting Implementation At The Central Sulawesi Provincial Environment Agency

Wichencha Priskila Lasiewa ¹⁾; Azzahra Annisa Putri ²⁾; Ernawati Usman ³⁾
Sugianto ⁴⁾; Abdul Pattawe ⁵⁾

^{1,2,3,4,5)} Universitas Tadulako / Akuntansi

Email: ¹⁾ wsspriskila04@gmail.com ; ²⁾ anisaputriazzahra673@gmail.com

³⁾ ernawatyusman02@yahoo.co.id ; ⁴⁾ sugianto@untad.ac.id ; ⁵⁾ abdulpattawe@gmail.com

How to Cite :

Lasiewa, W, P., Putri, A, A., Usman, E., Sugianto, Pattawe, A. (2025). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Studi Implementasi Penganggaran Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2(1).

ARTICLE HISTORY

Received [29 Agustus 2025]

Revised [28 September 2025]

Accepted [30 September 2025]

KEYWORDS

Performance-Based Budgeting; Local Government; Public Accountability Abstract.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ulang makna penganggaran berbasis kinerja dalam organisasi sektor publik dengan fokus pada implementasinya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah. Dilakukan secara kualitatif dengan metode eksploratif melalui pengamatan, wawancara, dan studi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran diarahkan sesuai visi dan misi daerah serta menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menentukan prioritas program. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui publikasi laporan pada situs resmi dan pemantauan langsung pelaksanaan kegiatan. Studi ini menyoroti keberhasilan program Sulteng Recycle Center (SRC) sebagai inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Meski masih terdapat kendala koordinasi antarbidang dan kebutuhan peningkatan sistem, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah terus memperbaiki pengelolaan anggaran guna mendukung pembangunan lingkungan berkelanjutan.

ABSTRACT

This research revisits the meaning of performance-based budgeting in public sector organizations, focusing on its implementation at the Environmental Agency Office (DLH) of Central Sulawesi Province. It was conducted qualitatively using an exploratory method through observation, interviews, and theoretical studies. The study results indicate that budget preparation is directed according to the region's vision and mission and uses Key Performance Indicators to determine program priorities. Transparency and accountability are realized through the publication Center (SRC) as an innovation in converting plastic waste into fuel using pyrolysis technology. Although coordination challenges between fields and the need for system improvement remain, the Environmental Agency of Central Sulawesi Province continues to enhance budget management to support sustainable environmental development.

PENDAHULUAN

Penerapan konsep akuntabilitas telah mulai diterapkan di Indonesia sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Instruksi ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus bertanggung jawab kepada instansi pemerintah lainnya dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta guna meningkatkan kapasitas instansi dalam mencapai visi, misi, dan sasaran organisasi. Instansi pemerintah menggunakan laporan akuntabilitas dalam pelaksanaannya sebagai sarana penyampaian informasi yang mendukung sistem pelaporan kinerja yang didasarkan pada perencanaan strategis serta menggunakan berbagai indikator, metode, mekanisme, dan prosedur tertentu. Penekanan pada kapasitas ini awalnya hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi kini diperluas ke berbagai aspek lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatur kewajiban setiap instansi pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. Bukti tanggung jawab ini disampaikan melalui laporan kinerja secara berkala dari instansi tersebut. Sistem Akuntabilitas merupakan suatu

rangkaian kegiatan, alat, dan prosedur yang disusun secara sistematis oleh instansi pemerintah untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, mengklasifikasikan, serta menyelaraskan operasional instansi dalam kerangka akuntabilitas agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pelaksanaan sistem ini meliputi enam unsur utama yaitu: 1) perencanaan strategis; 2) pengambilan keputusan untuk bertindak; 3) pengukuran aktivitas; 4) pengelolaan data kinerja; 5) penyusunan laporan kinerja; serta 6) analisis dan evaluasi hasil kinerja. Keenam unsur tersebut berfungsi saling terintegrasi sebagai satu kesatuan dalam proses pengukuran akuntabilitas.

Reformasi manajemen keuangan publik di Indonesia telah mendorong perubahan mendasar dalam orientasi pengelolaan anggaran pemerintah, dari sekadar berfokus pada input menuju pada pencapaian hasil (outcome) dan kinerja. Salah satu instrumen penting dalam perubahan ini adalah penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), yang bertujuan menjembatani hubungan antara alokasi anggaran dan hasil program yang diharapkan (Robinson & Last, 2009). Konsep ini menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki justifikasi yang jelas dalam bentuk capaian kinerja yang terukur. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah Indonesia mengarahkan seluruh lembaga publik untuk menerapkan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sistem pengukuran kinerja, keterbatasan sumber daya manusia, dan budaya birokrasi yang masih tradisional (Muttakin et al., 2015).

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam konteks sektor lingkungan hidup, menjadi semakin krusial karena program-programnya bersifat publik, fisik, dan berdampak langsung pada masyarakat. Pengelolaan sampah, penghijauan, drainase, dan pengendalian pencemaran merupakan contoh kegiatan yang menuntut keterkaitan erat antara penggunaan anggaran dan hasil nyata di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana konsep Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diterapkan dalam sektor ini sangat penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penggunaan dana publik. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu institusi yang strategis untuk ditelaah, mengingat perannya yang penting dalam pelaksanaan program fisik lingkungan sekaligus sebagai representasi penerapan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di tingkat daerah.

Berbagai penelitian secara internasional telah menunjukkan bahwa penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Studi komparatif oleh Robinson & Last (2009) pada beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris menemukan bahwa penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan perbaikan kinerja fasilitas. Sementara itu, Mauro et al. (2016) mengidentifikasi tiga fokus utama dalam praktik Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di sektor publik, yakni praktik anggaran, implementasi, serta pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Sejumlah penelitian di Indonesia mengonfirmasi meskipun desain Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) telah diadopsi secara formal, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data kinerja, kesenjangan kapasitas teknis aparatur, dan ketidakselarasan antara indikator kinerja dan tujuan program (Uwuigbe & Ajibolade, 2013; Wang, 2016).

Namun demikian, literatur yang secara khusus menelaah implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dalam program fisik lingkungan hidup di tingkat pemerintahan daerah masih terbatas. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek desain kebijakan, bukan pada praktik pelaksanaan dan evaluasi di sektor teknis seperti lingkungan hidup. Di sinilah letak kebaruan ilmiah (novelty) artikel ini. Pertama, artikel ini menyoroti implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dalam program fisik lingkungan di tingkat pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang dimana sebuah domain yang relatif jarang dikaji. Kedua, penelitian ini menghubungkan secara sistematis antara alokasi anggaran, indikator kinerja, dan hasil program (output maupun outcome) dalam konteks nyata pelaksanaan program fisik lingkungan. Ketiga, artikel ini mengintegrasikan pendekatan empiris berbasis studi kasus lokal dengan analisis kebijakan publik, sehingga menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif untuk reformasi penganggaran sektor lingkungan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Akuntansi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Mahmudi (2011:92) yang mengutip Accounting Principles Board (APB) No. 4 menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu aktivitas dalam bidang jasa yang berperan menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan aktivitas ekonomi suatu entitas, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi ketika memilih di antara beberapa alternatif. Sementara itu, Pontoh (2013:2) menyebutkan bahwa akuntansi pada dasarnya menghasilkan informasi dari sistem akuntansi yang terdapat dalam suatu entitas atau

organisasi, dan informasi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak, seperti masyarakat umum, kalangan akademisi atau peneliti, serta para pengambil keputusan dalam dunia usaha.

Akuntansi memiliki ciri khas tersendiri dalam konteks sektor publik karena berkaitan dengan pengelolaan dana publik. Sujarweni (2015:1) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas pelayanan yang mencakup proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan atas transaksi atau kejadian ekonomi, yang pada akhirnya menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pengelolaan dana publik pada lembaga-lembaga pemerintahan tingkat pusat maupun unit di bawahnya. Sementara itu, Bastian (2010:3) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai seperangkat mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan untuk mengelola dana masyarakat pada organisasi pemerintahan tingkat tinggi, departemen, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, serta proyek kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Perkembangan akuntansi sektor publik didorong oleh perubahan paradigma manajemen pemerintahan melalui penerapan Manajemen Publik Baru (*New Public Management/NPM*). Manajemen Publik Baru (*New Public Management/NPM*) adalah teori yang mengubah cara pengelolaan administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20 dan diperkenalkan oleh Christopher & Hood. NPM menandai pergeseran paradigma dari sistem birokrasi tradisional ke pendekatan yang lebih berorientasi pada pasar dan fokus pada kinerja. Teori ini mengintegrasikan berbagai praktik bisnis ke dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam memberikan layanan publik. Fokus utama NPM adalah untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen serta disiplin ilmu lainnya dalam organisasi sektor publik.

Salah satu instrumen penting yang berkembang dalam kerangka NPM adalah Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting/PBB*). Penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting/PBB*) diartikan sebagai pendekatan penyusunan anggaran yang menghubungkan sumber daya keuangan dengan hasil dan capaian kinerja yang dapat diukur. Metode ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dengan memastikan dana dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu (Suwanda et al., 2021). *Performance Based Budgeting* (PBB) adalah penerapan data kinerja yang terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan anggaran. Pendekatan ini dapat langsung mempengaruhi alokasi dana atau menjadi masukan dalam perencanaan anggaran, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi sepanjang prosesnya. *Performance Based Budgeting* (PBB) memberi informasi yang jelas kepada pembuat kebijakan dan masyarakat tentang tujuan pengeluaran dan hasil yang ingin dicapai (OECD, 2019). Selain itu, *Performance Based Budgeting* (PBB) merupakan bagian dari kerangka reformasi yang lebih luas yang bertujuan membangun sektor publik yang berorientasi hasil dan akuntabel, yang dikenal dengan istilah "ekosistem kinerja" (OECD, 2019). *Performance Based Budgeting* (PBB) menyelaraskan biaya proyek yang dibutuhkan dengan hasil yang diharapkan dari pengeluaran pemerintah, dengan fokus pada kegiatan yang didanai dan keluaran yang dihasilkan (Suwanda et al., 2021). Pendekatan ini juga menggabungkan keluaran dalam program untuk mencapai dampak yang diinginkan (outcomes). Implementasi *Performance Based Budgeting* (PBB) berperan penting dalam meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi. Agar berhasil menerapkan pendekatan ini, institusi pendidikan tinggi harus fokus pada kompetensi manajemen, komitmen organisasi, sistem penghargaan yang efektif, dan kualitas institusi secara keseluruhan (Lorensius & Tresia, 2021).

Konsep anggaran sendiri dipahami sebagai bagian dari proses pengendalian manajemen. Menurut Halim (2011:81), anggaran merupakan bagian penting dalam proses pengendalian manajemen yang memuat rencana kerja tahunan yang disajikan secara kuantitatif dalam satuan nilai moneter. Sementara itu, Mardiasmo (2018) mendefinisikan anggaran sebagai bentuk pernyataan mengenai perkiraan kinerja yang ingin dicapai selama periode tertentu dan ditampilkan dalam ukuran keuangan, sedangkan penganggaran dipahami sebagai proses penyusunan anggaran tersebut. Selanjutnya, Halim (2012) menekankan bahwa anggaran memiliki peran yang sangat signifikan bagi pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintah dan fungsi pelayanan publik. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan pendekatan penyusunan anggaran yang menghubungkan antara input dengan output serta outcome yang diharapkan dari suatu program, termasuk memastikan efisiensi pencapaiannya. Dengan demikian, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan prinsip value for money. Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*) menurut Radhiansyah Emil (2014) pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang secara otomatis diarahkan pada kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Sistem ini membantu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan menetapkan standar tersebut, lembaga publik dapat mengelola pengeluaran dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya secara lebih baik (Suryanto et al., 2023).

Penilaian terhadap kinerja pemerintah bertumpu pada penerapan prinsip *value for money* serta efektivitas penggunaan anggaran. Melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, ruang dominasi pemerintah dapat dikontrol melalui peningkatan kesadaran biaya (*internal cost awareness*), pelaksanaan audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi oleh pihak eksternal. Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk bersikap hemat, efisien, dan mempertimbangkan biaya dalam setiap keputusan. Selain diarahkan untuk melakukan pengelolaan dana secara ekonomis, pemerintah juga diwajibkan mencapai target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Sebuah instansi pemerintah dinilai memiliki kinerja yang baik apabila pelaksanaan program yang berada dalam kerangka anggaran dan sasaran organisasi mampu mendukung pencapaian strategi pemerintah daerah. Pada prinsipnya, penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Rencana strategis yang diterjemahkan ke dalam target tahunan akan terus ditinjau dan diperbaiki secara berkelanjutan (Deputi IV Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses, praktik, serta dinamika penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dalam konteks nyata pemerintahan daerah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diterapkan dalam program-program fisik lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan infrastruktur drainase.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang menerapkan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) secara langsung dalam kegiatan fisik dan pelayanan publik. Penelitian dilakukan selama bulan oktober 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan anggaran berbasis kinerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian penting untuk memastikan terselenggaranya program-program lingkungan yang efektif dan efisien. Sistem ini mengarahkan alokasi dana ke setiap programnya dengan diselaraskan dengan visi misi daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Implementasi ini menuntut pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, serta mampu menghadapi tantangan dalam penentuan prioritas di setiap bidang. Melalui sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menciptakan hasil nyata yang dapat terukur serta berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Informasi yang kami peroleh melalui wawancara dengan Ibu Nurfaidah, [S.Sos.M.AP](#) sebagai Kasub Bagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang secara langsung terlibat dalam proses penganggaran dan pengelolaan program di DLH.

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di DLH

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dengan mengikuti program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing bidang. Alokasi dana diarahkan kepada kegiatan yang dianggap prioritas dengan mempertimbangkan visi misi gubernur dan IKU sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan, silang pendapat terkait prioritas kegiatan antar bidang sering terjadi, namun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah menjaga fokus pada visi besar melalui koordinasi dan evaluasi secara berkala. Pengelolaan anggaran juga diperhatikan dari sisi efisiensi dengan melakukan penghematan biaya yang mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Mekanisme penghematan ini berjalan sejalan dengan regulasi dan diarahkan agar tidak mengganggu target kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang tidak efisien selalu dilakukan dengan memastikan penggunaan dana sesuai program dan kegiatan yang telah disusun.

Efektivitas dan Transparansi Program Fisik

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah mengedepankan evaluasi dan pemantauan hasil program secara langsung. Selain memastikan hasil dapat terukur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah juga mengutamakan transparansi dengan mempublikasikan

seluruh laporan anggaran dan capaian kinerja di website resmi yang dapat diakses masyarakat umum. Hal ini memperlihatkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah dalam membuka ruang bagi publik untuk mengawasi kinerja dan realisasi anggaran.

Salah satu contoh keberhasilan program dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah yang nyata adalah peresmian *Sulteng Recycle Center* (SRC) yang merupakan inovasi fasilitas pengolahan sampah menggunakan teknologi pirolisis untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM). Program ini tidak hanya mendukung bidang persampahan, tetapi juga membantu memberikan solusi atas permasalahan lingkungan yang ada di Sulawesi Tengah. Program ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dan mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tengah juga menargetkan agar *Sulteng Recycle Center* (SRC) dapat mendukung operasional internal dan meningkatkan pemilahan sampah di masyarakat.

Akuntabilitas dan Monitoring

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah juga menjaga akuntabilitas melalui pelaporan realisasi anggaran dan capaian kinerja secara rutin kepada pihak terkait serta publik. Laporan tersebut memperlihatkan pemanfaatan anggaran yang tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Mekanisme monitoring juga mencakup evaluasi dampak lingkungan dari program yang dibiayai sehingga keterkaitan antara anggaran, input, dan hasil dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh.

Tantangan dan Harapan

Tantangan utama yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah perbedaan penilaian prioritas antar bidang yang memerlukan koordinasi dan pemahaman bersama. Selain itu, sistem perlu terus diperbaiki agar lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan teknis atau administratif. Diharapkan dengan sistem yang lebih baik, waktu pelaksanaan program dapat dihemat tanpa mengurangi kualitas dan hasil yang dicapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai kemajuan yang berarti dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja yang menitikberatkan pada aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran. Penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan prioritas program dan keselarasan dengan visi misi daerah memungkinkan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan yang memberikan dampak positif dan nyata bagi masyarakat luas. Terbukti, keberhasilan operasional seperti *Sulteng Recycle Center* (SRC) menjadi contoh nyata hasil sinergi antara alokasi anggaran yang tepat sasaran dengan output yang terukur dan bermanfaat. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan penguatan koordinasi antar bidang serta peningkatan kualitas sistem penganggaran untuk mendukung pelaksanaan program yang lebih optimal dan efektif.

Oleh karena itu, penting bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan koordinasi lintas bidang agar keputusan terkait prioritas program dapat diambil secara lebih selaras dan efektif. Percepatan pengembangan sistem penganggaran yang responsif, praktis, dan akurat menjadi kebutuhan utama guna membantu proses pengelolaan serta pelaksanaan program secara efisien dan tepat waktu. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan dan pemahaman sistem penganggaran sangat krusial agar implementasi berjalan dengan maksimal. Selaras dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah perlu memperluas dan memperkuat transparansi pelaporan anggaran dan capaian kinerja melalui media publik agar masyarakat secara luas dapat mengakses informasi tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik. Dengan penekanan pada penguatan koordinasi, pengembangan sistem, kapasitas SDM, dan transparansi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi berbagai pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, N. N., Alfian, A., & Hasan, A. N. (2025). *The utilization of standard costs in performance-based budgeting system in Indonesian government institutions*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/396234947_The_Utilization_of_Standard_Costs_in_Performance-Based_Budgeting_System_in_Indonesian_Government_Institutions

- Afronisa, P. N., & Erawati, N. M. A. (2024). *The effect of performance-based budgeting, accounting control and reporting systems on government performance accountability*. *Jurnal Ekonomi*, 13.
- Anton, M. G., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2016). *Penerapan anggaran berbasis kinerja untuk menunjang akuntabilitas publik pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado*.
- Azam, M. (2024). *Performance-based budgeting reform and evolution of performance information quality in various public sector organisational settings*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Retrieved from <https://ideas.repec.org/a/eme/ipbafm/ipbafm-12-2023-0223.html>
- Hiola, Y., & Mahmud, A. D. (2024). *Analisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo*. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(1).
- Insight into the critical success factors of performance-based budgeting during COVID-19 pandemic. (2022). *Sustainability*, 14(20), 13198. <https://doi.org/10.3390/su142013198>
- Javad Pourghaffar, H., Mohammadzadeh Salteh, M., Zeynali, M., & Mehrani, S. (2023). *The relationship between performance-based budgeting characteristics with the integrated reporting approach in the public sector*. *Iranian Journal of Accounting, Auditing & Finance Quarterly*, 7(4), 57–75. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/385702250_The_Relationship_between_Performance-based_Budgeting_Characteristics_with_the_Integrated_Reporting_Approach_in_the_Public_Sector
- Kuntadi, C., & Velayati, E. (2022). *Factors affecting the implementation of performance-based budget*. *Eduvest: Journal of Universal Studies*. Retrieved from <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/607/1236>
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mauro, P., Romeu, R., Binder, A., & Zaman, A. (2016). *Modernizing the framework for fiscal policy and public debt sustainability analysis*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781513590740.006>
- Muttakin, M. B., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility: Evidence from Bangladesh. *Pacific Accounting Review*, 27(3), 353–372. <https://doi.org/10.1108/PAR-01-2013-0007>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Good practices for performance budgeting*. OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/05/oecd-good-practices-for-performance-budgeting_0a446f98/c90b0305-en.pdf
- Ramadhan, M. A., & Hendratno. (2023). *Penaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(9).
- Robinson, M., & Last, D. (2009). *A basic model of performance-based budgeting*. Technical Notes and Manuals, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund.
- Situmorang, D. D. P., Erlina, Sirojuzilam, & Rujiman. (2023). *Assessing the impact of performance-based budgeting on regional development and environmental outcomes mediated by government agency accountability in Dairi district*. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(9).
- Sriyono, Saepudin, A., Rahmanda, G. A., & Pradessa, S. G. (2024). *Optimizing university finances: Implementation of performance-based budgeting at UPN "Veteran" Yogyakarta*. *Journal of Business and Information Systems*, 6(2).
- Susanto, H. H. (2023). *Analysis of output cost standards in performance based budgeting framework*. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 5(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47*.
- Uwuigbe, O. R., & Ajibolade, S. O. (2013). Effects of corporate governance on sustainability disclosure: A study of listed companies in Nigeria. *European Journal of Business and Social Sciences*, 2(9), 76–92.
- Wang, X. (2016). *Performance-based budgeting in the public sector*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315708331>